

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi aspek krusial bagi perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi internal, tetapi juga sebagai sumber informasi utama bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, standar akuntansi yang diterapkan harus mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat dan andal.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terutama dalam sektor industri yang saat ini mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam dunia bisnis. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut perusahaan di dunia berlomba-lomba dalam menyesuaikan diri agar mereka dapat bertahan di dunia bisnis yang sedang menghadapi persaingan bisnis semakin ketat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen. Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan pelayanan konsumen perusahaan membutuhkan aset tetap (*fixed assets*) untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan (Saputri Mashuri & Laela Ermaya, 2022) (Aprilia dkk., 2023).

Aset tetap bermanfaat untuk kegiatan produksi barang atau jasa, proses administrasi, dan bisa digunakan selama lebih dari satu periode atau jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Oktaviana & Khusbandiyah, 2016). Penambahan jumlah aset dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam mengelola aset, perusahaan dapat melakukan pembelian langsung terhadap aset atau mengadakan perjanjian sewa. Belakangan ini perusahaan-perusahaan cenderung lebih condong untuk menyewa aset dari pada membelinya secara langsung. Alasan dibalik pilihan ini adalah untuk menghindari pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan, pembayaran pajak, serta risiko penurunan nilai aset akibat depresiasi. Dalam konteks penyewaan,

perusahaan hanya perlu membayar biaya sewa tanpa ada kewajiban biaya tambahan.

Menurut Mashuri & Ermaya (2021) bahwa perusahaan harus banyak mempersiapkan dana yang relatif besar. Perusahaan yang tidak memiliki cukup dana bisa mencari alternatif lain untuk memperoleh aset tetap tersebut, salah satunya melalui perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang sewa. Alternatif *leasing* umumnya digunakan oleh perusahaan yang tidak mempunyai investasi yang cukup untuk melakukan pembelian aset tetap (Prajanto, 2020). Menurut Martani (2018:317) dengan menggunakan sistem sewa dapat membuat beban operasional perusahaan dalam bentuk penyusutan aset tetap menjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pembelian langsung.

Saat ini perusahaan pembiayaan sedang berkembang terbukti dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset yang dimiliki perusahaan pembiayaan hingga bulan Maret 2018 atau kuartal I sebesar Rp 483,92 triliun mengalami peningkatan sebesar 7,65% dari total aset periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 34,4 triliun, sehingga dalam melakukan kegiatan sewa setiap perusahaan wajib mengikuti aturan dan standar yang berlaku agar penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai akan berdampak dalam penyajian laporan keuangan. Oleh sebab itu dalam perlakuan akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman yang mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sewa dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi sewa terus melakukan perubahan mengikuti standar Internasional. Standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia adalah PSAK berbasis *GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)*. Namun, Pada tahun 2008 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memutuskan untuk mengadopsi *IFRS* dan secara resmi pada tahun 2012 menerapkan pada perusahaan yang *go public* (Situmorang 2018:8). Perubahan adopsi juga dapat mengubah ketentuan yang terkandung didalamnya, IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, termasuk PSAK 71 yang menyusun tentang instrumen keuangan dengan mengacu

pada *IFRS 9*, PSAK 72 mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang merujuk pada *IFRS 15* dan PSAK 73 mengatur sewa dengan merujuk pada *IFRS 16*. Pada tahun 2020 terdapat perubahan besar terhadap standar akuntansi sewa di Indonesia. Pada tahun tersebut Indonesia mengadopsi *IFRS 16* yang diadopsi sebagai (PSAK 73 kemudian menjadi PSAK 116) menggantikan PSAK 30. Perubahan ini memiliki dampak signifikan karena PSAK yang baru menghapus perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan untuk akuntansi penyewa. *IFRS 16* mengharuskan entitas untuk melakukan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa terhadap kontrak-kontrak sewa yang sebelumnya tidak diakui pada PSAK 30 atau diakui sebagai beban dan menghapuskan perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan yang ada pada PSAK 30 (IFRS Foundation, 2016), salah satu dampak signifikannya adalah kenaikan liabilitas yang terjadi pada Garuda Indonesia ketika melaporkan adanya kenaikan total liabilitas sebesar 229% (menjadi US\$ 12,73 miliar) setelah menerapkan PSAK 73 berdasarkan Bisnis.com pada tahun 2021.

PSAK 73 berjalan efektif mulai 1 Januari 2020, kemudian beberapa entitas publik berbasis PSAK *IFRS* telah menerapkan sejak Januari 2020. Pada tanggal 8 Februari 2024, IAI mengumumkan SAK Indonesia update PSAK 116 berlaku efektif 2024 dan seterusnya. Hal ini memberikan dampak terhadap perubahan penyajian laporan keuangan karena pengaturan dalam PSAK 116 mengubah secara substansial perlakuan akuntansi atas sewa dan mengharuskan penyewa (*lessee*) untuk mencatat kontrak sewa dalam model akuntansi tunggal dengan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) dan untuk pemberi sewa (*lessor*) tidak ada perubahan ketentuan, sehingga tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) atau sewa operasi (*operating lease*). Sejak diberlakukannya PSAK 116 “Sewa” pada 1 Januari 2024, seluruh kontrak sewa oleh penyewa kini wajib dicatat di neraca sebagai aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*), menggantikan perlakuan *off-balance sheet* pada standar sebelumnya. Penerapan standar ini menghasilkan peningkatan signifikan pada total aset dan liabilitas perusahaan, yang secara langsung mengubah struktur modal, rasio *leverage*, serta beban bunga dan

penyusutan. Fenomena ini berdampak penting terutama pada sub sektor otomotif dan komponen, yang secara historis sangat bergantung pada aset sewaan seperti fasilitas produksi dan gedung. Karena itu, penelitian ini akan berangkat dari teori *lease accounting* (PSAK 116/IFRS 16), *signaling* teori di mana perubahan struktur modal merupakan informasi penting bagi investor serta *trade-off theory*, yang menjelaskan keseimbangan antara biaya dan manfaat beban utang baru. Kajian terdahulu seperti Fauzi & Yustiani (2021) juga telah memperlihatkan perubahan rasio keuangan (DER, DAR, ROA, ROE) pasca penerapan PSAK 73 di perusahaan publik Indonesia. Namun, tanpa fokus pada otomotif, riset tersebut belum bisa menggambarkan situasi sektor ini secara spesifik.

Sejak berlakunya PSAK 116, pendekatan akuntansi sewa bagi *lessee* (penyewa) mengalami perubahan mendasar dari model dualistik menjadi model tunggal (*single approach*), di mana hampir seluruh transaksi sewa kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah harus diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa di neraca. Aset hak guna diukur pada saat pengakuan awal berdasarkan jumlah liabilitas sewa ditambah pembayaran di muka, biaya langsung awal, dan estimasi biaya pembongkaran/restorasi, dikurangi insentif sewa yang diterima. Liabilitas sewa sendiri dihitung sebagai nilai kini (*present value*) dari seluruh pembayaran sewa yang akan datang, menggunakan tingkat bunga implisit dalam kontrak sewa atau, jika tidak tersedia, tingkat pinjaman inkremental perusahaan.

Dalam pelaporan keuangan berikutnya, aset hak guna disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya (menggunakan metode garis lurus atau metode lain yang mencerminkan pola konsumsi manfaat), sementara liabilitas sewa diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, sehingga setiap periode pelaporan mencerminkan beban bunga dan pengurangan pokok utang sewa. Dampaknya, laporan laba rugi tidak lagi mencatat “beban sewa operasional” secara rata seperti pada PSAK 30, melainkan dua komponen terpisah yaitu beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Pola ini menggeser struktur biaya dari linier menjadi dekresen lebih tinggi di awal periode

dan menurun seiring berjalannya waktu yang berpotensi menurunkan laba bersih di tahun-tahun awal penerapan.

Perubahan ini memiliki implikasi langsung terhadap analisis rasio keuangan dan valuasi perusahaan. Di satu sisi, peningkatan aset melalui aset hak guna dapat memperkuat persepsi investor terhadap kapasitas operasional perusahaan dalam memanfaatkan aset sewaan secara efisien, sebagaimana ditemukan oleh (Heryana dkk., 2023; Hutabarat dkk., 2024). Di sisi lain, pembengkakan liabilitas sewa meningkatkan *leverage* perusahaan, yang dapat memicu persepsi negatif terkait risiko likuiditas dan tekanan arus kas, terutama jika perusahaan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai dari aset sewaan tersebut. Dalam konteks sektor otomotif dan komponen yang sangat bergantung pada fasilitas produksi, mesin, dan logistik berbasis sewa pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa secara jujur dan transparan menjadi krusial dalam membentuk kepercayaan pasar terhadap kinerja dan nilai jangka panjang perusahaan.

Penelitian sebelumnya Ahalik (2019) menyimpulkan bahwa PSAK 73 mewajibkan persyaratan sewa operasi harus memenuhi semua kriteria, yaitu sewa aset jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan) yang aktivitya bernilai rendah. Jika kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka diakui sebagai sewa pembiayaan. Mashuri & Ermaya (2021) mengungkapkan bahwa dampak dari hasil kapitalisasi *leasing* akan mempengaruhi perubahan material yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan. Amelia et.al (2018) kemudian melakukan penelitian mengenai dampak penerapan PSAK 73 tentang sewa guna usaha terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur, pertambangan, dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan sebelum PSAK 73 diberlakukan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kapitalisasi sewa perusahaan manufaktur terhadap rasio solvabilitas cukup signifikan pada *Debt to Equity* (DER) yang mengalami peningkatan sebesar 7,70%, sedangkan *Debt to Asset* (DAR) tidak mengalami perubahan yang terlalu besar, yaitu sebesar 6,62%. Kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan pada rasio profitabilitas setelah adanya kapitalisasi sewa industri manufaktur berupa penurunan *Return on Equity*

(ROE) sebesar 0,38%, sedangkan *Return On Asset* (ROA) tidak mengalami banyak perubahan dengan adanya kapitalisasi sewa yaitu sebesar -1,78%.

Tingkat utang dan likuiditas perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi nilai perusahaan. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan, sementara likuiditas yang rendah dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penelitian oleh (Safitri dkk., 2019) menemukan bahwa kapitalisasi sewa akibat penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan DER yang signifikan, serta penurunan *Return on Equity* (ROE) secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur keuangan akibat PSAK 116 dapat memengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, industri otomotif dan komponennya juga merupakan sektor yang sangat bergantung pada aset sewa, seperti mesin produksi, kendaraan operasional, dan fasilitas gudang. Dengan penerapan PSAK 116, perusahaan-perusahaan di sektor ini mengalami peningkatan signifikan pada total aset dan liabilitas. Penelitian oleh (Amanta dkk., 2022) menunjukkan bahwa informasi aset hak guna berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan utang sewa berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa meskipun aset perusahaan meningkat, beban liabilitas yang lebih besar dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor.

Dari fenomena ini muncul permasalahan mendasar meski struktur neraca berubah dengan meningkatnya DER (*debt-to-equity ratio*) dan DAR (*debt-to-asset ratio*). Di Indonesia, beberapa studi awal telah menemukan tren peningkatan DER dan DAR pasca penerapan PSAK 116, sekaligus penurunan profitabilitas dan likuiditas. Perubahan standar ini memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang memiliki aktivitas sewa yang material, penerapan IFRS 16 meningkatkan liabilitas dan menurunkan profitabilitas di neraca perusahaan pada tahun pertama implementasi sehingga menyebabkan penurunan rasio likuiditas seperti *current ratio* (Amrie et. al, 2023). Namun, studi kuantitatif pasca 2020, terutama di subsektor otomotif & komponen masih terbatas. Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk diteliti dalam periode 2021–2024, yaitu setelah

beberapa tahun penerapan PSAK 73 berjalan. Pada periode tersebut, perusahaan-perusahaan di sektor otomotif dan komponen di Indonesia telah mulai menyesuaikan diri dengan standar baru, sehingga dampaknya terhadap nilai perusahaan dapat dianalisis secara lebih nyata.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan investor, manajemen, dan pemangku kebijakan untuk memahami sejauh mana perubahan struktur keuangan akibat PSAK 116 memengaruhi nilai pasar perusahaan otomotif. Nilai tersebut biasanya diukur melalui *Tobin's Q* atau PBV. (Heryana dkk., 2023) menemukan bahwa pengaruh aset hak-guna terhadap nilai perusahaan bersifat positif, sedangkan utang sewa berdampak negatif pada perusahaan non-keuangan pasca PSAK 73. Namun, riset ini menggunakan metode *cross-sectional* dan belum menyoroti likuiditas secara terpisah, sebuah elemen penting karena kemampuan arus kas jangka pendek sangat berperan dalam sinyal ke pasar (*Signalling Theory*) dan *trade-off* antara risiko kebangkrutan dan manfaat pajak utang (*Trade-off theory*).

Dari Penelitian sebelumnya, yakni penelitian oleh Saing & Hermansyah (2021) meneliti perusahaan telekomunikasi dan menemukan peningkatan aset, liabilitas serta rasio utang, tetapi tanpa menganalisis nilai pasar. Penelitian Safitri dkk., (2019) juga mencatat dampak signifikan pada struktur keuangan dan kinerja likuiditas sebelum dan sesudah PSAK 73. Namun, belum ada studi panel terbaru yang menguji secara simultan variabel utang, likuiditas, dan nilai saham, terutama pada sub sektor otomotif dan komponen di periode 2021–2024. Saya menawarkan penelitian *panel data* kuantitatif yang lebih komprehensif yaitu menguji pengaruh variabel DER, rasio likuiditas (*current/Quick Ratio*), dan penerapan PSAK 116 terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*/PBV) di sub sektor otomotif & komponen tahun 2021–2024. Metode ini memperhitungkan dinamika lintas waktu dan karakteristik perusahaan, serta memungkinkan kontrol atas variabel seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA), guna meminimalkan bias.

Secara ilmiah, pendekatan ini relevan karena menggunakan teori *Signalling* dan *Trade-Off*, serta teori likuiditas untuk menjelaskan bagaimana perubahan struktur keuangan pasca PSAK 116 memengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Regresi panel FE/RE yang diajukan (setelah uji Hausman) akan diuji

asumsi klasiknya (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi) untuk memastikan estimasi yang andal. Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan PSAK 116, Tingkat Utang dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2021-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah aset hak guna berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah liabilitas sewa berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah tingkat utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
5. Apakah aset hak guna, liabilitas sewa, tingkat utang, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh aset hak guna terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh liabilitas sewa terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh aset hak guna, liabilitas sewa, tingkat utang, dan likuiditas secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat penting bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai akuntansi keuangan berbasis standar internasional, khususnya penerapan PSAK 116 tentang sewa yang menggantikan PSAK 30. Dengan melakukan analisis terhadap hubungan antara utang sewa, aset hak guna, rasio keuangan, dan nilai perusahaan, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan dan valuasi perusahaan.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dalam mengembangkan kajian lanjutan yang lebih luas, baik dari sisi periode waktu, sektor industri, maupun penambahan variabel lain seperti profitabilitas, efisiensi operasional, atau analisis perbandingan antar negara. Studi ini juga

membuka peluang eksplorasi tentang bagaimana pengaruh standar pelaporan keuangan yang bersifat universal namun memiliki dampak sektoral yang berbeda-beda.

2. Secara Praktis

a. Bagi Emiten

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan, khususnya emiten di sub sektor otomotif dan komponen, sebagai bahan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK 116 terhadap struktur keuangan dan nilai perusahaan. Melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat memahami bagaimana perubahan utang sewa dan likuiditas memengaruhi nilai perusahaan di pasar. Temuan ini juga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih tepat, menyusun strategi komunikasi kepada investor, serta membandingkan kinerja dengan perusahaan sejenis dalam sektor yang sama.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Penelitian ini berkontribusi sebagai bahan ajar tambahan dan sumber pustaka empiris yang relevan dalam pengembangan kurikulum akuntansi keuangan, khususnya pada mata kuliah pelaporan keuangan dan standar akuntansi.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan riset-riset sejenis yang mendalam dan sektoral mengenai dampak standar pelaporan keuangan terhadap kinerja dan valuasi perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat untuk memastikan bahwa penelitian tidak terlalu dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Penelitian hanya akan difokuskan pada perusahaan yang berperan sebagai penyewa (*lessee*) sesuai dengan PSAK 116.